

TESIS

**PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* PASCA
REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TINGGIRAN DARAT)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) pada
Magister Administrasi Publik**

**Konsentrasi:
Manajemen Publik**

Oleh :

**MUHYAR RIFANI
NIM : 1920419310015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Judul : Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat (Studi Pelaksanaan Access Reform Pasca Redistribusi Tanah di Desa Tinggiran Darat)
Nama : Muhyar Rifani
NIM : 1920419310015
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Disetujui,
Komisi Penguji

Dr. Hj. Rahma Yuliani, M.Si
Ketua

Dr. Hastin Umi Annisah, MM.
Sekretaris

Prof. Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si
Anggota

Dr. H. Muslih Amberi, M.Si
Anggota

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si
NIP 197403072002121003

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si
NIP 197301221998021001

Tahun Lulus: 2023

Tanggal Wisuda:

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHYAR RIFANI
NIM : 1920419310015
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Pelayanan Publik
Program Pasca Sarjana : Universitas Lambung Mangkurat

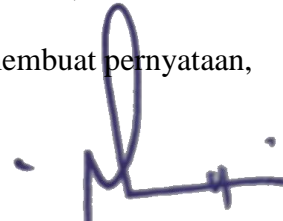
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Data yang ada di dalam tesis ini bukan merupakan hasil manipulasi sendiri maupun rekayasa orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHYAR RIFANI
NIM. 1920419310015



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin Telp/Fax(0511) 3307718
Email Center:maptbs_unlam@yahoo.com; Laman:www.map.ulm.ac.id

BERITA ACARA UJIAN AKHIR TESIS

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* telah dilaksanakan Ujian Akhir Tesis nomor surat *3520/UN8.1.13/KP.10.00/2023* jam *Sebelas* yang berjudul "*Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dalam Access Refrom Pasca Redistribusi Tanah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tinggiran Darat.*" mahasiswa :

Nama : **Muhyar Rifani**
NIM : **1920419310015**
Program : **Magister Administrasi Publik (MAP)**

Dengan nilai sebagai berikut:

Nama/Jabatan	Nilai (Angka)	Tanda Tangan
Penguji	80	
Dr. Hj. Rahma Yuliani, M.Si		
Penguji	80	
Dr. Hastin Umi Anisah, MM		
Penguji	80	
Prof. Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si		
Penguji	80	
Dr. H. Muslih Amberi, M.Si		
Rerata	80	

Demikian Berita Acara ujian akhir tesis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa yang Ujian

Muhyar Rifani
NIM. 1920419310015

Banjarmasin, 19 Juni 2023
Ketua Tim Penguji

Dr. Hj. Rahma Yuliani, M.Si
NIP.

Mengetahui:
Koordinator Program,

Dr. Taufik Arbain, S.Sos, M.Si
NIP: 197403072002121003



Catatan :

Blangko penilaian dan semua berkas dikembalikan ke bagian pendidikan oleh Ketua Tim Penguji dan tidak diberikan kepada mahasiswa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 549/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Muhyar Rifani

Dengan Judul Tesis:

Peran Kantor Pertanian Kabupaten Barito Kuala dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pelaksanaan Access Reform Pasca Redistribusi Tanah di Desa Tinggiran Darat)

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 11 Oktober 2023

Direktur,



Prof. Dr. H. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP. 196805071993031020

ABSTRAK

Mewujudkan cita-cita reforma agraria menjadi hal yang tidak bisa ditunda, masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan secara optimal sertifikat tanah hasil penataan aset untuk dilakukan penataan akses (*access reform*). Dari sisi kepastian hukum hak atas tanah, memang telah terlaksana dengan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah, namun dari sisi kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan atau taraf hidup pemegang hak atau penerima sertifikat, masih perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Badan Pertanahan Nasional berusaha mengoptimalkan *access reform* atau penataan akses melalui program pemberdayaan masyarakat dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mendorong dilaksanakannya *access reform*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Desa Tinggiran Darat memiliki potensi pertanian unggulan yang mendukung keberhasilan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu bentuk reforma agraria, yaitu integrasi penataan aset dari hasil pelepasan kawasan hutan dan penataan akses berupa dukungan kegiatan pemberdayaan budi daya dan pengolahan buah nenas dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif pada pelaksanaan *access reform* di lokasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pelepasan kawasan hutan di Desa Tinggiran Darat. Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan wawancara.

Berdasarkan penelitian ini, peran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala terhadap pemberdayaan masyarakat meliputi pembentukan tim penanganan akses reforma agraria dan penetapan lokasi, persiapan penanganan kegiatan reforma agraria, pemetaan sosial, penyuluhan program, penyusunan model, pendampingan penanganan akses, serta evaluasi dan pelaporan. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dari mulai kegiatan penataan aset hingga penataan akses mampu menjawab tantangan kegiatan reforma agraria dan membuktikan kehadiran pemerintah dalam upaya menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria.

Kata kunci : *Acces Reform*, redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

actualize the aspirations of agrarian reform is something that cannot be delayed, there are still people who have not optimally utilized land certificates outcome from asset arrangement in asset reform to access reform program. In legal certainty over land rights, The National Land Agency (BPN) has published certificated of land rights. However, from of the benefits for improving the welfare and economcy of the people who has receiving the certificate, it needs attention from various stakeholders. BPN is trying to optimize access reform through community empowerment programs based on Presidential Regulation No. 86 of 2018 about Agrarian Reform. The Barito Kuala District Land Office as representative of the Central Government in the regions, participates in empowering and encouraging the implementation of access reform.

This study aims to explain the role of the Barito Kuala District Land Office in implementing access reform after land redistribution in Tinggiran Darat Village, Mekarsari District, Barito Kuala District. Tinggiran Darat Village has excellent agricultural potential that supports the success of Agrarian Reform in South Kalimantan Province. One form of Agrarian Reform, namely the integration of asset management from the deliverance of forest areas and arrangement of access in the form of support for empowering activities for pineapple cultivation and processing with the aim of increasing the income of rural communities.

The research methods in using descriptive qualitative on the implementation of access reform in the location of Land Redistribution Objects of Agrarian Reform (TORA) in forest areas in Tinggiran Darat Village. Collecting data by conducting document studies and interviews.

Based on the result, the role carried out by the Barito Kuala District Land Office for community empowerment includes: forming a team for handling access to agrarian reform and determining locations, preparing for handling agrarian reform activities, social mapping, program counseling, modeling, assitane in handling access, as well as evaluation and reporting. The role of Barito Kuala District Land Office, starting from asset arrangement activities to access arrangement, is able to answer the challenges of agrarian reform activites and prove the government's presence in efforts to create agrarian based sources of prosperity and welfare for society.

Keyword: *access reform, land redistribution, community empowerment.*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul “Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pelaksanaan *Access Reform* Pasca Redistribusi Tanah di Desa Tinggiran Darat)” dapat diselesaikan. Ini merupakan laporan akhir perkuliahan berupa Tesis yang penulis susun untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Selanjutnya lewat kesempatan yang baik ini, tak lupa dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sutarto Hadi, S.Sos., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Rahma Yuliani, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan dan bimbingannya sejak dimulainya penyusunan rencana penelitian berupa proposal sampai pada selesainya penulisan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Hastin Umi Anisah, MM. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan koreksi terhadap kesempurnaan isi Tesis yang penulis kerjakan sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai ketentuan yang telah direncanakan.

5. Bapak Dr. Ahmad Suhaimi, S.sos, S.H, M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dan jajarannya yang telah memberikan dukungan moral dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh studi S2 Program Magister Administrasi Publik (MAP) pada Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen pengajar dan staf Tata Usaha Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan wawasan dan pengetahuannya serta pelayanan administrasi.
7. Isteri serta anak-anakku yang tersayang senantiasa memberikan dukungan dan do'a serta semangat hingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh responden penelitian yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat.
9. Teman-teman angkatan 32 program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan tesis ini, namun penulis meyakini bahwa isi tesis ini sekiranya dapat berguna bagi berbagai pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN TESIS	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2. Tinjauan Teoritis	14
2.2.1. Teori Peran	14
2.2.2. Reforma Agraria	16
2.2.3. Asset Reform.....	20
2.2.4. Access Reform	25
2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat	30
2.3. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Lokasi Penelitian	42
3.3. Informan Penelitian	43

3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barito Kuala.....	48
4.2. Gambaran Umum Lokasi Pemberdayaan Masyarakat.....	50
4.2.1. Penggunaan Tanah.....	52
4.2.2. Jumlah Penduduk	53
4.3. Sejarah Pola Keagrariaan di Desa Tinggiran Darat	53
4.4. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala.....	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Redistribusi Tanah di Desa Tinggiran Darat	59
5.1.1. Pembentukan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria dan Penetapan Lokasi Kegiatan.....	62
5.1.2. Persiapan Penanganan Kegiatan Reforma Agraria.....	66
5.1.3. Pemetaan Sosial	67
5.1.4. Penyuluhan Program	75
5.1.5. Penyusunan Model Pemberdayaan.....	77
5.1.6. Pendampingan Penanganan Akses	80
5.1.7. Evaluasi dan Pelaporan	86
5.2. Penanganan Akses Reforma Agraria	90
BAB VI PENUTUP	
6.1. Simpulan Penelitian	95
6.2. Saran dan Rekomendasi Penelitian.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.....	49
Tabel 4.2 Luas Daerah dan Jumlah Desa di Kecamatan Mekarsari.....	50
Tabel 5.1 Susunan Kelompok Kerja Penataan Akses Kabupaten Barito Kuala	64
Tabel 5.2 Data Pertanian dan Perkebunan Desa Tinggiran Darat.....	70
Tabel 5.3 Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Maju Bersama.....	73
Tabel 5.4 Daftar Nama Anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi Setara Sejahtera	74
Tabel 5.5 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tinggiran Darat	84
Tabel 5.6 Realisasi Penataan Akses di Desa Tinggiran Darat	88
Tabel 5.7 Daftar Nama Hasil Penataan Akses Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Rangkaian Kegiatan Redistribusi Tanah	24
Gambar 2.2 Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Mekarsari	51
Gambar 4.2 Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Mekarsari	52
Gambar 4.3 Peta Lokasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kecamatan Mekarsari	55
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ...	58
Gambar 5.1 Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat	77
Gambar 5.2 Diagram Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Akses Reform	79
Gambar 5.3 Peningkatan Infrastruktur Jalan di Desa Tinggiran Darat	87
Gambar 5.4 Komoditas Pertanian Nanas Pasca Panen dan Salah Satu Produk Hasil Pengolahan Nanas di Desa Tinggiran Darat	87
Gambar 5.5 Skema Tahun Jamak Penataan Akses Reforma Agraria	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara untuk Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa dan Aparat Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala
- Lampiran 3 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Nomor 59/KEP-63.10/VI/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pasca Legalisasi Aset Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara untuk Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

-
1. a . Apa yang dimaksud dengan Pemetaan Sosial?
b. Bagaimana pemetaan sosial tersebut dilakukan?
 2. a . Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam peningkatan kelembagaan?
b. Apakah koperasi/Kelompok Tani sudah ada di Desa Tinggiran Darat?
 3. Pendampingan usaha yang seperti apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan?
 4. a . Keterampilan apa yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat?
b. Apa yang diharapkan dari kegiatan peningkatan keterampilan tersebut?
 5. Mengapa diversifikasi usaha penting untuk dilakukan?
 6. Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam memberikan fasilitasi akses permodalan?
 7. Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam memberikan fasilitasi akses pemasaran?
 8. a. Infrastruktur pendukung seperti apa yang diperlukan dalam penataan akses?
b. Apakah infrastruktur pendukung tersebut sudah ada?
 9. Apakah ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan akses di Desa Tinggiran Darat?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa dan Aparat Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

1. Apa peran Kepala Desa, aparat desa serta warga guna mendukung penataan akses di Desa Tinggiran Darat?
2. Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam program ini?
3. Apa saja faktor pendukung penataan akses di Desa Tinggiran Darat?
4. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penataan akses di Desa Tinggiran Darat?
5. Bagaimana cara mengatasinya kendala dalam penataan akses di Desa Tinggiran Darat?
6. Dampak positif apa saja yang dapat dirasakan oleh kepala desa, aparat desa masyarakat penerima manfaat setelah dilaksanakannya program ini?
7. Apakah telah dilakukan evaluasi oleh pemerintah daerah maupun stakeholder lain yang terkait mengenai penataan akses ini?